

## Keberpihakan Pada Berita Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden

\*Muhammad Ikhwan<sup>1</sup>, Chani Tristiana<sup>2</sup>

E-Mail: muhammad.ikhwan@budiluhur.ac.id, 2071500090@student.budiluhur.ac.id

Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author

Submitted: 5 September 2024 Revised: 25 September 2024 Accepted: 05 Oktober 2024

Accredited Sinta-4 by Kemdikbud: No. 0041/E5.3/HM.01.00/2023

### Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), mengubah konstelasi politik dan ramai diberitakan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Putusan ini membuat anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres. Realitas itulah yang kemudian dikonstruksi menjadi berita. Penelitian ini ingin melihat bagaimana sindonews.com dan tvonenews.com memberitakan putusan MK tersebut. Kedua media ini dipilih karena pemilik media memiliki afiliasi terhadap Capres tertentu. Penelitian menggunakan metode framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicky. Perangkat framing dibagi kedalam empat struktur besar, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media terlihat mempraktikkan tiga keberpihakan tas bias, yakni *Bias by omission*, *Bias by selection of sources* dan *bias by story selection*. Selain itu, kedua media memiliki keberpihakan yang berbeda. Sindonews.com berpihak pada penolakan, sedangkan tvonenews.com berpihak pada pihak yang mendukung putusan MK. Dukungan sindonews terlihat dari isi dan narasumber yang muncul di berita, dengan kata dan frasa yang memberi sentimen negatif terhadap putusan MK. Sedangkan dukungan tvonenews.com juga terlihat dari penempatan narasumber, isi dan penggunaan kata serta frasa dalam teks berita. Keberpihakan itu tidak bisa dilepaskan dari afiliasi politik pemilik kedua media.

**Kata kunci:** Keberpihakan, kepemilikan media, afiliasi media, pemilihan Presiden,

### Abstract

*The Constitutional Court (MK) ruling that amended Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning the age limit for Presidential and Vice Presidential Candidates, changing the political constellation and widely reported ahead of the 2024 Presidential Election. This ruling allows President Jokowi's eldest son, Gibran Rakabuming Raka, to run as a vice presidential candidate. That reality is then constructed into news. This study wants to see how sindonews.com and tvonenews.com reported the Constitutional Court's decision. These two media were chosen because the media owners have affiliations with certain presidential candidates. The study uses the framing method, with Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicky's model. Framing devices are divided into four large structures: syntactic, script, thematic, and rhetorical. The results of this study show that both media appear to practice three biases, namely *Bias by omission*, *Bias by selection of sources* and *bias by story selection*. Besides that, both media have different biases. Sindonews.com sided with the rejection, while tvonenews.com sided with the party that supported the Constitutional Court's decision. Sindonews' support can be seen from the content and sources that appeared in the news, with words and phrases that gave negative sentiments towards the Constitutional Court's decision. Meanwhile, tvonenews.com's support can also be seen from the placement of sources, content, and use of words and phrases in the news text. Biases cannot be separated from the political affiliation of the owners of the two media outlets.*

**Kata kunci :** *Bias, media ownership, media affiliation, presidential election*

## PENDAHULUAN

Senin sore, 16 Oktober 2023, menjadi hari yang menentukan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan uji materi yang diajukan seorang mahasiswa bernama Almas Tsabbiqiru Re A. Dalam gugatannya, Almas menyoal Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Isi pasal itu dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Ia meminta pasal itu ditambahkan frasa “berusia sekurang kurangnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah” (Mahkamah Konstitusi., 2023).

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, MK Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK menyatakan bahwa Pasal 169 Huruf q UU Pemilu diubah menjadi: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Tim Detikcom, 2023).

Dengan putusan tersebut, maka orang yang belum berusia 40 tahun bisa maju jadi Capres atau Cawapres selama berpengalaman jadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Maka, usai putusan itu dibacakan, berbagai analisis, dan spekulasi beredar di ruang publik. Salah satunya mengaitkan dengan anak sulung Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil Presiden. Gibran, saat putusan itu dibacakan, masih berusia 36 tahun.

Berbagai analisis dan spekulasi yang muncul di berbagai pemberitaan media, khususnya media online, membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Pada beberapa media online, peneliti melihat, ada konflik kepentingan dan keberpihakan dibalik berita yang disajikan. Hal itu didasarkan pada aspek kepemilikan media. karena itu, peneliti memilih sindonews.com dan tvonenews.com. Pemilihan kedua media ini didasarkan atas faktor kepemilikan media, dimana pemilik media tersebut memiliki afiliasi politik pada Pilpres 2024.

Sindonews.com adalah media yang berada dalam naungan MNC yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo. Disaat yang sama, Hary Tanoesoedibjo merupakan pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo. Sementara dalam Pilpres 2024, Perindo mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang kemudian merupakan pesaing pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan tvonenews.com adalah media yang berada dibawah Grup Viva atau PT Visi Media Asia Tbk. Saham mayoritas PT Visi Media Asia dimiliki oleh Bakrie Global, perusahaan investasi yang dimiliki oleh konglomerat Aburizal Bakrie (Masduki et al., 2023:14). Aburizal Bakrie adalah mantan Ketua Partai Golkar periode 2009-2014. saat penelitian ini dilakukan, Bakrie menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, yang ia jabat sejak 2016. Pada 13 Agustus 2023, Partai Golkar menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto, yang setelah putusan MK, berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

Faktor kepemilikan dan afiliasi politik, akan berpengaruh terhadap kebijakan redaksi dan keberpihakan berita. Menurut Sudiby dalam Yani (2016:2) dalam pendekatan politik ekonomi media

berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan.

Masih dalam konteks ekonomi politik media disebut bahwa ternyata media tidak bisa netral dan objektif sebagaimana idealismenya. Media sangat terikat dan dipengaruhi oleh ideologi pemiliknya (*owner*). Pemilik media ikut serta dalam penentuan *angle*, arah dan framing dari isi berita yang akan ditampilkan (Musfialdy, 2019:26).

Dalam konteks jurnalisme, keberpihakan bila diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris adalah *partiality*. Pada kamus merriam-webmaster, *partiality* merupakan sinonim dari bias (Merriam webster, n.d. : 2024). Begitu juga dengan kamus Oxford (Oxford Learner's Dictionaries, n.d. : 2024). Pada artikel di website Metropolitan Community College, n.d. (2024) disebutkan, bias media terjadi ketika jurnalis atau organisasi berita membiarkan opini mereka sendiri sehingga memengaruhi berita yang mereka laporkan dan cara mereka melaporkannya.

Karena itu, penjelasan tentang keberpihakan dalam penelitian ini menggunakan konsep bias yang digunakan *news literacy project*, yang tertulis pada artikel di website Pressbooks, n.d. (2024). Dalam artikel tersebut, keberpihakan atau bias terjadi pada beberapa bentuk, yakni *bias by omission*, *bias by selection of*

*sources*, *bias by story selection*, *bias by placement* dan *bias by labelling*.

*Bias by omission* : terjadi ketika reporter menghilangkan satu sisi argumen, membatasi informasi yang yang disampaikan ke pembaca. Hal ini paling umum terjadi ketika berhadapan dengan berita politik. *Bias by selection of sources* : bias karena pemilihan narasumber: terjadi saat reporter atau media hanya memilih dan mengutip pernyataan narasumber yang pendapatnya hanya satu sisi. Sementara *bias by story selection* terjadi ketika sebuah media berita hanya memuat cerita yang mencerminkan sudut pandang tertentu. Adapun *bias by placement* : bias ini terjadi terkait dengan penempatan sebuah berita di medianya. Sedangkan *bias by labelling* : bias jenis ini memberikan label tertentu pada orang atau pihak tertentu, baik label positif maupun negatif.

Karena itu, Penelitian ini diharapkan bisa membongkar kepentingan politik dibalik sebuah berita, dalam hal ini kepentingan pemilik media sindonews.com dan tvonenews.com. kepentingan politik tersebut bisa terlihat dari keberpihakan atau bias yang terlihat dari berita. Dengan begitu, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan daya kritis dan literasi ketika mengkonsumsi sebuah berita. Selain itu, penelitian ini juga penting agar publik tidak terkecoh oleh manipulasi dan framing yang sengaja dibangun redaksi media, demi kepentingan politik pemiliknya.

Penelitian terkait keberpihakan dalam proses politik diantaranya pernah dilakukan oleh Azwar et al., (2021) yang melihat keberpihakan pada pemberitaan kampanye Pilpres 2019 di Kumparan.com. penelitian dengan metode analisis wacana kritis itu memperlihatkan adanya keberpihakan Kumparan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden,

yakni Jokowi – Ma’ruf Amin. Berita tentang kampanye Jokowi Ma’ruf Amin disajikan dengan memberi citra positif pada pasangan tersebut. Sedangkan pada pasangan Prabowo – Sandiaga Uno, digambarkan dengan citra negatif.

Penelitian sejenis dilakukan Dian Wardiana Sjucho & Alfani (2017) yang meneliti tentang keberpihakan media dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 pada koran Media Indonesia dan Republika. Hasilnya, Media Indonesia berusaha menggiring opini publik untuk memberikan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Syaiful Djarot. Dukungan itu terkait dengan dukungan pemilik Media Indonesia yang juga merupakan ketua umum Partai Nasdem. Sedangkan Republika berpihak pada pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Kepemilikan, latar belakang pendirian dan faktor ekonomi politik menjadi alasan keberpihakan itu.

Terakhir, penelitian dengan judul “keberpihakan dalam Pemilihan Persiden 2024)” yang ditulis Intan Permata Sari (2018). Hasilnya memperlihatkan keberpihakan media yang ditentukan oleh orientasi politik atau kepentingan pemilik media. Pemilik media sebagian besar seorang politisi, yang selain mendapatkan keuntungan politik sebagai orang yang mendukung salah satu calon, mereka juga mendapatkan keuntungan kapital dari pemberitaan-pemberitaan serta iklan yang ditayangkan di media mereka.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan dua penelitian tersebut, khususnya pada objeknya, yaitu berita politik. Yang membedakan adalah pada peristiwa politiknya, dalam hal ini Pemilihan Presiden 2024. Selain itu, keberpihakan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan teori bias dari *news literacy project*. Selain itu juga dikaitkan dengan aspek kepemilikan

media, yang ternyata sangat berpengaruh besar dalam kebijakan editorial sebuah media.

## METODE PENELITIAN

Analisis berita dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode framing. Pendekatan kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data sedalam dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling . Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampel lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2014:56-57).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi pada berita putusan MK. Berita putusan MK sebagai data primer tersebut kemudian menjadi objek penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan framing, menggunakan model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicky. Dalam pendekatan ini, perangkat framing dibagi kedalam empat struktur besar. Pertama, **struktur sintaksis** yang berhubungan bagaimana wartawan Menyusun peristiwa – pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan umum berita. Yang diamati dalam bagian ini ini adalah lead, latar, headline, kutipan yang diambil dan sebagainya. Kedua, **struktur skrip** yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, **struktur tematik** yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam bentuk proposisi, kalimat atau hubungan

antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Keempat, **struktur retorik** yang berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita (Eriyanto, 2008:255-256).

Dalam pandangan konstruktivisme, setiap media selalu memiliki strategi framing. *Framing* ini berasumsi bahwa media bisa membentuk perspektif tertentu, atau memutar” (*spin*), terhadap peristiwa yang disajikannya (Kurniasari & Aji, 2015:113).

Objek berita yang diteliti adalah berita yang muncul dari 16 Oktober 2023, khususnya setelah pembacaan putusan MK pada sore hari hingga 17 Oktober 2023. Dalam rentang waktu dua hari tersebut ditemukan 31 berita yang muncul di sindonews.com dan 43 berita yang muncul di tvonenews.com. Dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Jumlah Berita di sindonews.com dan Tvoneneews.com**

No	Tanggal Publikasi	Portal Berita	
		sindonews.com	tvonenews.com
1.	Senin, 16 Oktober 2023	15 Berita	10 Berita
2.	Selasa, 17 Oktober 2023	16 Berita	33 Berita
Jumlah Berita		31 Berita	43 Berita

(Sumber : Sindonews.com, n.d. dan TvOnenews.com, n.d.)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti memilih tiga berita dari masing masing media sebagai objek yang dianalisis. Tiga berita ini dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, yakni melihat kecenderungan atau keberpihakan media. Tiga berita tersebut adalah :

**Tabel 2. Judul Berita yang dianalisis**

Portal Berita	No	Judul Berita
Sindonews.com	1.	<i>Yusuf Lakaseng Perindo Sebut MK Jadi Alat Politik usai Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pernah Jabat Kepala Daerah</i>
	2.	<i>PHI: Putusan MK Hidupkan Lagi Praktik Nepotisme dan Kolusi</i>
	3.	<i>Polemik Putusan MK terkait Usia Capres, Pengamat: Tanda Erosi Demokrasi</i>
tvonenews.com	1.	<i>MK Kabulkan Putusan Ambang Batas Usia Capres dan Cawapres, KNPI Apresiasi</i>
	2.	<i>MK Sediakan Karpet Merah Bagi Gibran, Peluang Menjadi Cawapres Prabowo Makin Besar</i>
	3.	<i>Keputusan MK Terkait Gugatan Usia Capres/Cawapres sebagai Kemenangan Suara Anak Muda Berprestasi</i>

**Analisis berita 1 sindonews.com.**

Berita ini berjudul : “*Yusuf Lakaseng Perindo Sebut MK Jadi Alat Politik usai Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pernah Jabat Kepala Daerah*”.

Secara sintaksis, berita ini berisi wawancara Ketua DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng. Pemilihan narasumber pada berita ini, bisa ditebak kemana arah beritanya, karena Perindo mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Hal ini terlihat dari judul berita dan lead berita yang berisi :

*“Ketua DPP partai perindo Yusuf Lakaseng menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) kini menjadi alat politik di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini karena keputusan MK .....*

Pada struktur skema. kritik terhadap MK itu kemudian dihubungkan dengan pernyataan dari narasumber terkait keinginan Jokowi yang sebelumnya ingin memperpanjang masa jabatan dan menambah periode jabatan. Putusan MK ini dianggap Yusuf sebagai cara lain Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, setelah dua cara sebelumnya tidak berhasil. Analisis tersebut kemudian dihubungkan pula dengan Ganjar Pranowo yang menurutnya akan menuai simpati dari masyarakat.

Secara skrip, berita ini hanya berisi satu sisi saja dari pihak yang kontra dengan putusan MK. Aspek keberimbangan tidak muncul, karena tidak ada narasumber lain yang diwawancarai untuk melengkapi berita ini.

Dari sisi tematik, ada dua tema besar pada berita ini, yaitu Tuduhan MK sebagai alat politik Presiden Joko Widodo dan publik akan bersimpati pada Ganjar. Ini juga terlihat dari koherensi berita, dimana kritik Yusuf Lakaseng dihubungkan dengan Ganjar Pranowo yang akan menerima simpati karena dikhianati dari sesama parpolnya (PDIP).

*"Peristiwa ini nggak ke Ganjar. Publik malah kasihan ke Ganjar sudah dikepung banyak partai ditambah anak presiden, berarti harus dukung Ganjar,"*

Dari sisi retorik, teks berita memunculkan kata atau frasa yang isinya mengkritik dan memberikan sentimen negatif terhadap putusan MK dan Jokowi. Seperti penggunaan frasa "Alat politik" yang berarti cara yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan politik, dalam hal ini keinginan politik Jokowi, dengan mengintervensi putusan MK. Berikutnya frasa "Dinasti politik", yang berarti kekuasaan yang dipegang dan diatur oleh keluarga secara turun temurun (nepotisme). Penggunaan frasa itu ingin menggambarkan

bahwa putusan MK ini akan melahirkan dinasti politik, karena memberi peluang bagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai Wapres. Selanjutnya "Mahkamah Keluarga", adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai wadah yang digunakan untuk kepentingan keluarga Jokowi. Begitu juga dengan frasa "Mahkamah Kardus", adalah perumpamaan MK sebagai kardus yang mudah rusak (lemah) dan akan dibuang bila tidak dipakai lagi.

### **Analisis berita 2 sindonews.com.**

Berita kedua berjudul "PHI: Putusan MK Hidupkan Lagi Praktik Nepotisme dan Kolusi". Berita ini berisi kritik dari dua narasumber atas putusan MK terkait batas usia Capres Cawapres. Keduanya adalah Presidium Nasional Partai Hijau (PHI), John Muhammad dan Guru Besar Antropologi Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto. Pernyataan keduanya dikutip dalam sebuah diskusi. Pada unsur sintaksis, skema berita memperlihatkan isi berita yang berisi pendapat dua narasumber, yang keduanya mengkritik putusan MK. Ini terlihat dari teks pada lead berita :

*" Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kepala daerah bisa menjadi Capres Cawapres meski belum berusia 40 tahun menuai kritik dari berbagai kalangan. Putusan itu dianggap bentuk menghidupkan kembali praktik nepotisme dan kolusi di Indonesia."*

Secara skrip, berita ini hanya menampilkan narasumber yang menolak Keputusan MK, tanpa ada pihak yang mendukung atau netral atas putusan tersebut. Narasumber John Muhammad mengajak seluruh kalangan menolak putusan MK tersebut. Pernyataan John ini diikuti dengan kutipan pernyataan Sulistyowati yang mengajak warga atau

anak muda untuk menolak putusan MK, karena dikhawatirkan akan lahir pemimpin yang merugikan bangsa.

Pada struktur tematik, ada dua tema yang muncul dari teks berita. Yakni keputusan MK menghidupkan kembali praktik nepotisme di Indonesia, dan ajakan kepada warga untuk menolak keputusan MK karena dianggap akan melahirkan pemimpin yang merugikan bangsa.

Dari aspek retorik, teks berita memunculkan kata atau frasa yang berisi kritik, memberikan citra negatif atas putusan MK dan ajakan menolak putusan MK. Seperti penggunaan kata *lawan* dan *perlawanan*, yang berarti sebuah sikap untuk menolak, menentang dan mencegah. Dalam hal ini menolak putusan MK. Selanjutnya kata *nepotisme*, yaitu perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat, atau kecenderungan mengutamakan sanak saudara sendiri. lalu kata *kolusi*, yang artinya kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji, atau persekongkolan. Sedangkan *membunuh demokrasi* adalah tindakan mematikan atau tidak memperbolehkan demokrasi berjalan, karena putusan MK tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

### **Analisis berita 3 sindonews.com.**

Berita berjudul “Polemik Putusan MK terkait Usia Capres, Pengamat: Tanda Erosi Demokrasi”. Teks berita ini berisi pernyataan Direktur Puskapol UI, Hurriyah. Unsur sintaksis dari berita ini terlihat dari *lead* berita yang mencerminkan kemana arah berita ini ;  
 “Direktur Puskapol UI, Hurriyah menilai, polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menandakan terjadinya erosi demokrasi.....”

Unsur skrip pada berita ini sama dengan dua berita sebelumnya, yang hanya

menampilkan pernyataan narasumber yang dikutip dalam sebuah diskusi. Lead diatas, diperkuat dengan narasi pada kalimat berikutnya yang berisi :

“keputusan itu membuktikan keberhasilan pimpinan eksekutif yang notabenehnya dipilih secara demokratis, menggunakan popularitas dan kekuasaannya dalam rangka memandulkan demokrasi”

Setelah mengkritik putusan MK, pada teks berita, Hurriyah mengajak masyarakat untuk mengkampanyekan dan memboikot keputusan tersebut, agar demokrasi bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Struktur tematik pada berita ini terlihat dari dua tema besar, yakni putusan MK menandakan terjadinya erosi demokrasi, dan harapan agar masyarakat untuk terus mengkampanyekan penolakan putusan MK.

Dari sisi retorik, teks berita banyak memunculkan kata dan frasa yang mengkritik dan menolak keputusan MK tersebut. Yakni *erosi demokrasi*, *memandulkan demokrasi*, *menggolkan ambisi kekuasaan*, *melemahkan institusi demokrasi*, *memandulkan oposisi*, dan *boikot*. Bila dimaknai, *erosi demokrasi* bisa diartikan sebagai pelemahan kualitas demokrasi secara perlahan-lahan dengan meruntuhkan sistemnya. Sedangkan *memandulkan demokrasi* merupakan upaya agar sistem demokrasi menjadi tidak berfungsi dan tidak efektif. *Memandulkan oposisi* berarti membuat pihak-pihak yang menentang atau mengkritik pemerintah menjadi tidak berdaya atau tidak berpengaruh. *Menggolkan ambisi kekuasaan* artinya mencapai keberhasilan dengan membenarkan segala cara lewat otoritas yang dimiliki. *Melemahkan institusi demokrasi* berarti membuat berbagai institusi demokrasi, seperti partai, lembaga

legislatif, lembaga yudikatif, menjadi lembaga yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan kata *boikot* mengacu pada menolak untuk bekerjasama, dalam hal ini ajakan untuk menolak hasil putusan MK terkait batas usia capres cawapres.

### Analisis berita 1 tvonenews.com

Berita pertama tvonenews.com yang dianalisis berjudul ; “*MK Kabulkan Putusan Ambang Batas Usia Capres dan Cawapres, KNPI Apresiasi*”. Berbeda dengan sindonews.com, teks berita tvonenews.com justru memperlihatkan dukungan terhadap putusan MK. Hal itu terlihat dari unsur sintaksis, khususnya pada tulisan di lead berita :

“ Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kepala daerah yang usianya belum mencapai 40 tahun ...”.

Setelah *lead*, berita mengutip pernyataan Ketua KNPI, Ryano yang mengatakan, putusan itu membuat peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres menjadi lebih terbuka. Dibagian berikutnya, berita menyajikan pernyataan Ryano tentang kelebihan generasi muda dalam memimpin, seperti memiliki ide ide segar, inovatif kemampuan yang tidak kalah dengan generasi tua. Dari unsur skrip terlihat isi teks berita ini tidak lengkap, karena hanya mengutip pernyataan Ryano, tanpa ada narasumber penyeimbang.

Stuktur tematik pada berita ini ada dua. Pertama, menyambut baik keputusan MK. Kedua, keputusan MK membuka peluang bagi generasi muda terlibat aktif dalam proses politik.

Dari sisi retorik, terdapat kata dan frasa yang memberi sentimen positif dan dukungan terhadap putusan MK. Yakni “*menyambut baik*”, “*ketidakadilan*”,

“*merobohkan stigma*” dan “*agen perubahan*”. Frasa *menyambut baik* pada teks berita, secara kontekstual, artinya menerima dan mendukung putusan MK, karena dianggap memberikan kebaikan. Kata “*ketidakadilan*” dalam teks berita, merujuk pada pembatasan usia pada pencalonan capres cawapres pada aturan lama, sebagai ketidakadilan, karena tidak memberi peluang bagi generasi muda untuk mencalonkan. Frasa *merobohkan stigma*, artinya menghilangkan citra negatif yang selama ini dipercaya. Dalam konteks teks berita, frasa itu ingin menghilangkan kesan atau kepercayaan yang menganggap kaum muda tidak bisa memimpin negara. Sedangkan frasa *agen perubahan* merujuk pada pihak atau orang yang bisa melakukan perubahan. Dalam teks berita, dimaksudkan sebagai pengakuan bahwa generasi muda bisa melakukan perubahan.

### Analisis berita 2 tvonenews.com

Berita kedua yang dianalisis berjudul : “*MK Sediakan Karpas Merah Bagi Gibran, Peluang Menjadi Cawapres Prabowo makin Besar*”. Berita ini berisi pernyataan pengamat politik, Ujang Komaruddin. Struktur sintaksis bisa dilihat di bagian awal dan lead berita, yang berisi kutipan dari pernyataan narasumber :

“Mahkamah Konstitusi telah memberikan karpas merah atau jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi tentang batas usia calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah...”

Pada bagian berikutnya, berita menyajikan pernyataan Ujang soal PDIP yang akan menentukan Cawapres pendamping Ganjar. Pernyataan itu kemudian diikuti dan dilengkapi dengan

pernyataan Megawati Soekarno Putri terkait penentuan Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Selain Megawati, juga ada pernyataan ketua TPN GP, Arsyad Rasyid. Dengan skema seperti itu, tvonenews.com berusaha menyajikan berita secara berimbang untuk memenuhi struktur skrip. Namun secara teknis dalam penulisan berita, informasi di judul dan *lead*, adalah informasi paling penting dan menggambarkan *angle* atau sudut pandang berita. Dengan kata lain, penempatan pernyataan Megawati dan Arsyad Rasyid hanya untuk sebagai pelengkap, untuk memenuhi aspek keberimbangan.

Dari stuktur tematik, ada dua tema besar pada berita ini. Pertama, MK telah memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024, dan kedua, Ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri akan mencari pendamping terbaik untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Dari sisi retorik, ada beberapa kata dan frasa yang bisa dianalisis. Pertama, frasa “Karpet Merah”, yang merupakan istilah untuk sambutan atau seremoni untuk menyambut pejabat. Dari pengertian itu, karpet merah dalam teks berita bermakna putusan MK sebagai cara untuk menghormati Gibran Rakabuming Raka yang akan dicalonkan sebagai Cawapres. Frasa lawan politik adalah sebutan untuk pihak atau kandidat lain yang berkompetisi untuk merebut kekuasaan. Dalam teks berita, konteks frasa ini adalah pernyataan Ujang Komaruddin bahwa Megawati akan mencari Cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang bisa mengimbangi popularitas kandidat lainnya, dalam hal ini Prabowo Gibran.

### Analisis berita 3 tvonenews.com

Berita ini berjudul “*Keputusan MK Terkait Gugatan usia Capres/Cawapres sebagai Kemenangan Suara Anak Muda Berprestasi*”. Pada berita ini, terlihat jelas dukungan tvonenews.com terhadap putusan MK. Hal itu terlihat dari unsur sintaksis, yang terlihat dari penempatan judul dan lead berita :

“Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch, M Fauzan menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan anak muda dibawah 40 tahun bisa menjadi pemimpin nasional merupakan kemenangan bagi anak muda Indonesia”.

Secara skrip, berita ini hanya berisi pernyataan M Fauzan, tanpa ada narasumber penyeimbang yang menolak putusan MK. Struktur berita seluruhnya berisi dukungan terhadap putusan MK, dengan berbagai alasan. Seperti memberi kesempatan untuk anak muda menjadi pemimpin dan bonus demografi yang berisi mayoritas anak muda.

Struktur tematik pada berita ini terdiri atas dua, yakni keputusan MK merupakan kemenangan bagi anak muda, dan ajakan kepada anak muda untuk mendukung keputusan MK.

Dukungan terhadap putusan MK terlihat jelas dari unsur retorik, yang terlihat dari penggunaan kata dan frasa dalam teks berita. Yaitu “*kemenangan anak muda*”, “*keputusan yang positif*” dan “*pemimpin nasional*”. *Kemenangan anak muda* merujuk pada pencapaian yang berhasil diperoleh atau dicapai untuk generasi muda. Dalam hal ini, putusan MK tersebut dianggap sebagai keberhasilan orang muda untuk menjadi pemimpin. Begitu juga dengan frasa *Keputusan yang positif* berarti putusan MK, yang berdampak baik bagi masyarakat. sedangkan *pemimpin nasional* adalah orang yang menjadi pemimpin pada level nasional, dalam hal ini adalah Presiden.

Analisis tiga berita pada sindonews.com dan tvonenews.com di atas menggambarkan bagaimana kedua media melakukan keberpihakan, dengan cara yang berbeda. Sindonews.com secara vulgar memperlihatkan keberpihakannya pada penolakan atas putusan MK terkait ambang batas usia Capres Cawapres. Sementara tvonenews.com bersikap sebaliknya.

Keberpihakan atau bias pada sindonews.com terlihat dari tiga berita yang dianalisis, dimana semua narasumber yang diwawancarai adalah orang yang menolak dan mengkritik putusan tersebut. Itu artinya berita yang disajikan tidak berimbang. Secara definitif, keberimbangan berita adalah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan (omission) dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan (Eriyanto, 2011: 195). Konsep ini menjabarkan bagaimana media menampilkan berita yang berimbang, tidak memihak, tidak berat sebelah dan selalu cover multi side (Parahita, 2019:11).

Selanjutnya, *Angle* dan *frame* berita memperlihatkan bagaimana keberpihakan media ini. Sikap redaksi yang seperti ini, bisa diduga, karena sindonews.com adalah media yang berada dibawah grup bisnis MNC Group. Usaha ini dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Partai Perindo. Partai ini dalam Pilpres 2024 mendukung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Dalam riset keberpihakan dan afiliasi politik di Indonesia yang dilakukan Masduki dkk (2023), afiliasi yang terlihat pada MNC Group adalah afiliasi langsung, dimana pemilik atau pengelola media sekaligus merupakan pejabat publik, calon atau anggota parlemen (DPR/DPRD/DPD), dan pengurus partai politik. Sementara dari sisi model afiliasi politik, apa yang terlihat pada sindonews.com masuk dalam tingkat

*extreme*, dimana pemilik media dan keluarganya (pemegang saham, komisaris, direksi) sekaligus menjadi ketua parpol, calon legislatif, atau anggota DPR/DPD/DPRD, kepala pemerintahan tingkat pusat/daerah (Masduki et al., 2023:XII).

Sementara tvonenews.com bersikap berbeda dengan sindonews.com. media ini berada dibawah Grup Viva atau PT Visi Media Asia Tbk, perusahaan terbuka yang saham mayoritasnya dimiliki politisi Partai Golkar Aburizal Bakrie. karena itu, Bakrie juga berkepentingan dengan putusan MK, karena dengan putusan ini, partai koalisi pemerintah Jokowi, akan lebih mudah memasang Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto.

Afiliasi yang terlihat pada tvonenews.com adalah afiliasi tidak langsung. Hal ini terlihat karena Aburizal Bakrie tidak duduk langsung di struktur organisasi media, tapi ia menempatkan orang-orang kepercayaan dan keluarganya. di ANTV dan TV One, ia menempatkan anaknya, Ardiansyah Bakrie sebagai Presiden Komisaris. Di TV One, ia juga menempatkan menantunya, Taufan Eko Nugroho sebagai Direktur utama. Sedangkan di tvonenews.com, ia menempatkan Lalu Mara Satriawangsa sebagai dewan redaksi. Lalu Mara adalah politisi Partai Golkar dan juru bicara keluarga Aburizal Bakrie (Masduki et al., 2023:34).

Keberpihakan atau bias dari kedua media, terjadi dalam tiga bentuk, yakni *Bias by omission*, *Bias by selection of sources* dan *bias by story selection*. *Bias by omission* terlihat karena berita yang disajikan kedua media membatasi isi berita yang hanya menampilkan satu sisi informasi saja. Dalam hal ini, sindonews.com mengkritik keputusan MK, sebaliknya tvonenews.com

memuji putusan itu. Hal ini juga terlihat pada bentuk *bias by selection of sources*, dimana narasumber yang dihadirkan secara tidak berimbang. Berikutnya, pada *bias by story selection* juga terlihat karena isi dan frame berita mencerminkan kepentingan politik dari pemilik media. Dalam hal ini, sindonews.com berusaha mendegradasi putusan MK. Sebaliknya tvonenews.com berusaha melegitimasi putusan MK, karena dianggap baik untuk bangsa.

Keberpihakan yang terlihat pada sindonews.com dan tvonenews.com ini juga menggambarkan bahwa kedua media tidak independen. padahal, persoalan independensi dan keberpihakan, menjadi hal penting dalam kode etik jurnalistik. bahkan hal itu dinyatakan di Pasal 1, yang berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Independen diartikan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers (dewanpers).

Selain prinsip independensi, prinsip lainnya yang harus dipedomani media adalah keberpihakan pada warga. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam Fianto dkk (2023:3) mencantumkan hal ini dalam poin kedua dari sembilan elemen jurnalisme. Kesetiaan pada warga ini adalah makna dari independensi jurnalistik. Independensi adalah bebas dari semua kewajiban, kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik.

Sementara McQuail dalam Khotimah (2019:138) menguraikan beberapa indikator penting dalam melihat persoalan independensi (objektivitas), diantaranya: ada tidaknya opini, unsur personalisasi, sensasionalisme, *stereotype*,

*juxtaposition* atau *linkage*, dan akurasi dalam pemberitaan.

Dominasi pemilik media dalam menentukan isi berita juga tergambar dari pendapat William L. Rivers dalam Hajad (2016:6-7) yang menyatakan, tidak ada media yang netral karena pers ataupun media akan selalu berpihak terutama pada kepentingan pemiliknya. Rivers juga mengatakan bahwa kebebasan pers yang berlaku di dunia adalah kebebasan pemilik pers (*freedom for media owner*). “Pemilik media masih bisa menempatkan berita yang penting untuknya –meskipun tidak terlalu penting untuk umum –di halaman pertama atau pada jam tayang utama (*prime time*). Sebaliknya berita tertentu bisa saja ditahan atau batal dimuat.

Intervensi pemilik media bisa terjadi atas dua cara. Pertama, intervensi yang dilakukan secara langsung. Intervensi model ini dilakukan jika si pemilik turun tangan atau ikut campur atau mengendalikan kebijakan program dan redaksi. Intervensi ini dilakukan dengan cara yang halus seperti memberikan himbauan, menelpon langsung atau memanggil redaksi untuk memberikan arahan (Rianto et al., 2014:144). Intervensi yang paling ekstrim terjadi secara terorganisir melalui sistem organisasi, misalnya, pemilik melalui staf yang dipercaya membangun suatu divisi khusus yang dipersiapkan untuk mengakomodir kepentingan si pemilik. Hal ini pernah dilakukan Metro TV saat pemiliknya baru saja mendirikan partai Nasdem. Caranya dengan membentuk “desk-Nasdem” yang mengatur reporter khusus, kameramen khusus, produser khusus, untuk merencanakan framing berita, mengatur editorial, mempersiapkan simbol-simbol yang digunakan yang memiliki asosiasi dengan Nasdem dan sebagainya (Rianto et al., 2014:145).

Sedangkan intervensi tidak langsung dilakukan oleh pemilik melalui tangan-tangan orang lain –yang oleh pemilik diberikan kewenangan untuk melakukannya. Dalam beberapa kasus, pemilik tidak melakukan intervensi secara langsung, tapi melalui pihak lain (Rianto et al., 2014:146). Model seperti ini bisa terjadi pada tvonenews.com, dimana Aburizal Bakrie menempatkan keluarga dan orang-orang kepercayaannya dalam kepengurusan media.

Secara prinsip tugas utama jurnalis adalah mencari dan mengungkapkan kebenaran. Kewajiban utama jurnalis adalah mengabdikan kepada publik. Dua utama itulah yang melahirkan peran media sebagai anjing penjaga (*watch dog*). Media juga bisa dipahami sebagai *public sphere* dimana ide-ide warga bertemu, diperdebatkan, dievaluasi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama yang bermanfaat bagi kebaikan Bersama (Suranto et al., 2008:45).

Apa yang terlihat pada sindonews.com dan tvonenews.com, telah mencederai hal itu. Media tidak lagi menjadi wadah bagi jurnalisme untuk menyuarakan suara warga dan memberitakan fakta secara berimbang, melainkan sudah menjadi instrumen untuk kepentingan politik pemilik medianya. Bagaimanapun, media punya peran penting dalam mempengaruhi khalayak, dalam konteks pemilihan langsung. Karena itu, Fermana & Zetra (2021:4) menyebut, partai politik dan aktor politik akan berusaha mempengaruhi agenda media untuk mengarahkan pendapat umum melalui pembentukan citra (Cangara, 2016).

Kondisi ini semua tidak terlepas dari konglomerasi media, dimana kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kebenaran menjadi hilang. Semua itu karena adanya proses agenda setting dan framing yang dilakukan oleh media yang disesuaikan

dengan kepentingan pemiliknya (Pembayun, 2015:109).

## SIMPULAN

Sindonews.com dan tvonenews.com memiliki skema yang hampir sama dalam menunjukkan keberpihakan. Sindonews berpihak pada penolakan putusan MK, dengan menempatkan narasumber yang kritis dan menolak putusan MK tersebut. Isi pernyataan narasumber semuanya mengkritik putusan MK, dengan menggunakan kata atau frasa yang memberikan sentimen negatif atas putusan MK tersebut.

Keberpihakan sindonews.com atas penolakan putusan MK, terkait dengan afiliasi politik pemilik medianya. Afiliasi yang terlihat pada MNC Group adalah afiliasi langsung, dimana pemilik atau pengelola media sekaligus pengurus partai politik. Sementara dari sisi model afiliasi politik, apa yang terlihat pada sindonews.com masuk dalam tingkat *extreme*.

Sedangkan tvonenews.com menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang mendukung putusan MK. Keberpihakan yang dilakukan tidak se-ekstrim sindonews.com, karena di salah satu beritanya, masih menempatkan kutipan orang yang berseberangan dengan putusan MK, yakni Megawati Soekarno Putri dan Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rasyid. Keberpihakan media ini terlihat dari narasumber yang didominasi pihak yang arah pernyataannya, mendukung putusan MK. Dukungan itu terlihat dari kata dan frasa yang digunakan dalam teks berita.

Keberpihakan ini juga terkait dengan kepemilikan media. tvonenews.com adalah media yang berada dibawah Grup Viva yang saham mayoritasnya dimiliki politisi Partai Golkar Aburizal Bakrie. Afiliasi yang

terlihat pada tvonenews.com adalah afiliasi tidak langsung, karena pemilik media tidak terlibat langsung dalam kepemimpinan media, melainkan menggunakan keluarga dan orang-orang kepercayaan, yakni anak, menantu dan juru bicara keluarga.

Dari teori tentang keberpihakan atau bias, kedua media terlihat mempraktikkan tiga bias, yakni *Bias by omission*, *Bias by selection of sources* dan *bias by story selection*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Putra, R. P., & Uljanatunnisa. (2021). Unsur Keberpihakan Pada Pemberitaan Media Online Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kampanye pada Kumparan.Com. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3. <https://doi.org/10.15408/jsj.v3i1.19878>
- Dhn/tor. (2023). *Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>
- Dian Wardiana Sjachro, & Alfani, H. (2017). Jurnalisme Politik Dan Konstruksi Keberpihakan Media Dalam Pilgub DKI Jakarta (Analisis Framing Headline Harian Media Indonesia dan Republika Sehari Sebelum dan Sehari Sesudah Pencoblosan Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua 2017) [Universitas Kristen Satya Wacana]. In *Kolase Komunikasi di Indonesia*. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13387/21/BOOK\\_DianWardiana%20HendraAlfani\\_JurnalismePolitik.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13387/21/BOOK_DianWardiana%20HendraAlfani_JurnalismePolitik.pdf)
- Eriyanto. (2008). *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)* (N. H. SA (Ed.); 5th ed.). LKiS Yogyakarta.
- Fermana, R. A., & Zetra, A. (2021). Relasi Media Massa Dan Politik Pada Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 11(1), 4. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/4501/2698/>
- Fianto, L., Ghofur, M. A., & Qorib, F. (2023). Implementasi Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach Dan Tom Rosenstiel Pada Berita Media Online. *Jurnal Bincang Komunikasi*, 1(2), 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jbk.1.2.2023.1-9>
- Hajad, V. (2016). MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 6-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/source.v2i2.295>
- Khotimah, N. (2019). Tantangan Independensi Media Dalam Pemilu: Kasus Kompas.Com. *Department of Islamic Communication and Broadcasting*, 4, 138. <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.2.3623>
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (7th ed.). KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA Group). [https://books.google.co.id/books?id=gI9ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=gI9ADwAAQBAJ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwish6y64\\_XnAhUZVH0KHZL-AaUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=gI9ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=gI9ADwAAQBAJ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwish6y64_XnAhUZVH0KHZL-AaUQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false)
- Kurniasari, N., & Aji, G. G. (2015). Kepemilikan Dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(1), 113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jikm.6.1.96-116>
- Masduki, Utomo, W. P., Wendratama, R. E., Kurnia, N., Rianto, P., Aprilia, M. P., Zuhri, S., Edvra, P. A., Tristi, M. A., Paramastri, M. A., Adiputra, W. M., & Suci, P. L. N. (2023). *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia* (E. Wendratama (Ed.)). Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). <https://intermedianusantara.id/id/books/kepemilikan-dan-afiliasi-politik-media-di-indonesia/>
- Merriam webster. (n.d.). *Partiality / Bias*. Merriam Webster. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/partiality>
- Metropolitan Community College. (n.d.). *Media Bias*. Metropolitan Community College. <https://www.mccneb.edu/Community-Business/Library/Research-101/Media->

- Bias
- Musfialdy. (2019). Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media. *Jurnal Riset Komunikasi*, 2, 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i1.50>
- Oxford Learner's Dictionaries. (n.d.). *Partiality / Bias*. Oxford Learner's Dictionaries. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/partiality?Q=partiality>
- Parahita, T. A. (2019). Analisis Isi Tingkat Keberimbangan Berita Rubrik News Dan Showbiz Yang Disajikan Dalam Portal Berita Line Today. *Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP*, 7, 11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/23340>
- Pembayun, J. G. (2015). Konglomerasi Media dan Dampaknya Pada Pilpres 2014. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/interaksi.4.2.109-116>
- Pressbooks. (n.d.). *Media Bias*. Pressbooks. <https://pressbooks.pub/mediastudies/chapter/media-bias/>
- Rianto, P., Rahayu, Yusuf, I. A., Wahyono, B., Zuhri, S., Cahyono, M. F., & Siregar, A. E. (2014). *KEPEMILIKAN DAN INTERVENSI SIARAN Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang* (I. Poerwaningtias (Ed.)). Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). <https://pr2media.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Kepemilikan-Intervensi-Siaran-lengkap.pdf>
- Sahudi, H. A., Kurniawan, U., Siahaan, G. L., Santoso, D. N., & Agung, I. S. (2023). *Permohonan Uji Materi Pasal 169 Huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Mahkamah Konstitusi; Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA). [https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan\\_3296\\_2901\\_PermohonanAlmas.pdf](https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan_3296_2901_PermohonanAlmas.pdf)
- Sari, I. P. (2018). Keberpihakan Media dalam Pemilihan Presiden 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(1), 73–86. <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i1.488>
- Sindonews.com. (n.d.). *Index Sindonews.com*. Sindonews.Com. <https://index.sindonews.com>
- Suranto, H., Ramdojo, J. J., & Wisudo, P. B. (2008). *Kritis meliput pemilu* (H. Suranto (Ed.); 1st ed.). Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/06392.pdf>
- TvOnenews.com. (n.d.). *Index TvOnenews.com*. TvOnenews.Com. <https://www.tvonenews.com/indeks/all/all/2023>
- Yani, W. O. N. (2016). Keberpihakan Media Massa Dalam Berita Pemilihan Gubernur DKI 2017 – 2022. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3, 2. <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialektika/article/view/101>